

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH), DAN PENDAPATAN DAERAH LAIN YANG SAH (PDS) TERHADAP BELANJA DAERAH: Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016**

**RINGKASAN SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**



**1116 28941  
ELISTA AGUSTRIYANI**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA  
YOGYAKARTA  
2020**

## SKRIPSI

### PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH), DAN PENDAPATAN DAERAH LAIN YANG SAH (PDS) TERHADAP BELANJA DAERAH

(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2016)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

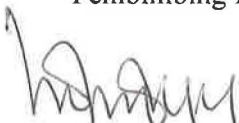
**ELISTA AGUSTRIYANI**

**No Induk Mahasiswa: 111628941**

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 27 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

#### Susunan Tim Penguji:


Pembimbing I

  
Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

Pembimbing II

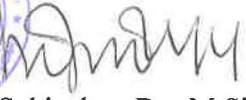
  
Dheni Indra Kusuma, SE., M.Si., Ak.

Penguji

  
Algifari, Drs., M.Si.

Yogyakarta, 27 Agustus 2020  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua



  
Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH), DAN PENDAPATAN DAERAH LAIN YANG SAH (PDS) TERHADAP BELANJA DAERAH: Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016

Elista Agustriyani, STIE YKPN Yogyakarta, elistaagustriyani1508@gmail.com

### ABSTRACT

*The objective of this research is to examine the effect of Locally Generated Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Other Legal Revenue and Regional Expenditure. The independent variables used are PAD, DAU, DAK, DBH, while the dependent variable is Regional Expenditure. This research was conducted with a sample size of 29 districts and 8 cities from a total of 38 districts / cities in East Java Province for the 2016 period.*

*The results showed that partially, PAD, DAU, DBH and PDS explained a unidirectional relationship or had a positive effect on regional spending. Meanwhile, DAK does not have a positive effect on regional spending. The F test shows that the five independent variables, namely PAD, DAU, DAK, DBH, and PDS simultaneously have a significant effect on regional spending with the value of Sig.  $0.000 > \alpha = 0.005$ .*

**Keywords:** *Locally Generated Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue Sharing Fund (DBH), Other Legal Revenue (PDS) and Regional Expenditure (BD).*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji terjadi atau tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Daerah Lain yang Sah (PDS) terhadap Belanja Daerah. Variabel independen yang digunakan adalah PAD, DAU, DAK, DBH dan PDS, sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah Belanja Daerah. Penelitian ini dilakukan dengan jumlah sampel 29 kabupaten dan 8 kota dari jumlah seluruhnya 38 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur untuk periode 2016.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, PAD, DAU, DBH dan PDS menerangkan hubungan searah atau berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Sedangkan DAK tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Uji F menunjukkan bahwa kelima variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK, DBH, dan PDS secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dengan nilai Sig.  $0,000 > \alpha = 0,005$ .

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Daerah Lain yang Sah (PDS) dan Belanja Daerah.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Pendahuluan

Ketentuan MPR RI No.XV/MPR/1998 menjadi dasar hukum ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 menjembatani diselenggarakannya otonomi daerah (Bastian, 2003, hal. 1). Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di Indonesia mulai berlaku semenjak Januari 2001. Undang-undang berlaku saat ini yaitu UU No.33 Tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 2014. Otonomi daerah merupakan kewenangan dan kewajiban daerah otonom yang diberikan keleluasaan dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya daerah dengan sedikit keterlibatan pemerintah pusat sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun hal yang mendorong berlangsungnya otonomi daerah disebabkan pembangunan yang berjalan selama ini tidak merata sehingga penyebabnya adalah terjadi ketidakadilan diantara pemerintah pusat serta pemerintah daerah dan antar daerah. Hal tersebut mengakibatkan penghambatan dalam proses perkembangan potensi/daya/kemampuan tiap-tiap daerah. Kebijakan desentralisasi adalah kebijakan dalam mewujudkan daerah mandiri. Dengan demikian pemerintah daerah otonom memiliki wewenang dalam mengelola, menata serta mengurus kepentingan daerah otonom berdasar kepada aspirasi masyarakat daerah setempat (Ferdiansyah, 2018).

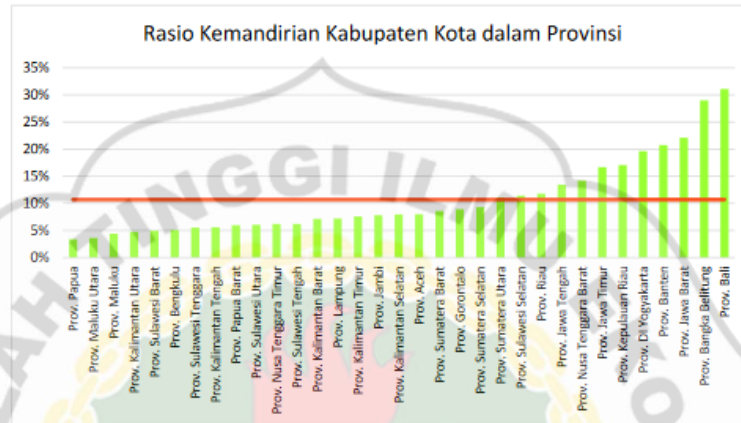
Struktur utama APBD adalah Pendapatan Daerah (PenDa), Belanja Daerah (BD), dan Pembiayaan/Transfer Daerah. Pendapatan daerah merupakan seluruh kas atau pemasukkan dana yang dapat menjadikan bertambahnya saldo anggaran lebih pada periode anggaran dan merupakan hak PEMDA serta tidak untuk dibayar kembali (Siregar, 2017, hal. 32). PenDa diklasifikasikan menjadi 3 bagian meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan/Transfer, dan Pendapatan Daerah lain yang Sah (PDS).

Dampak otonomi daerah kepada kabupaten/kota adalah pengelolaan keuangan di bawah kekuasaan pemerintah daerah kemudian ditumpahkan dalam bentuk APBD. Hal ini dapat diketahui sejauh mana kemampuan pemerintah daerah membiayai pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayahnya. Melalui APBD yang disusun oleh pemerintah daerah diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan potensi daerah tersebut. Oleh karena itu, diharapkan pendapatan asli daerah merupakan penerimaan dana terbesar supaya dapat membiayai

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengeluaran belanja daerah. Dengan demikian, kesimpulannya PAD, DAU, DAK, DBH dan PDS merupakan hal-hal yang mempengaruhi Belanja Daerah.

Dalam publikasi yang diterbitkan DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) dengan judul Deskripsi dan Analisis APBD 2016 terdapat rasio seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 1

Sumber: djpk (data diolah),2020.

Gambar 1 diatas merupakan rasio PAD terhadap pendapatan seluruh pemerintah daerah yang digolongkan per provinsi. Dihitung dengan cara menjumlah PAD seluruh pemerintah daerah satu provinsi kemudian dibagi total pendapatan daerah provinsi tersebut. Rata-rata rasio kemandirian kabupaten dan/atau kota dalam provinsi tersebut sebesar 11%. Pada tahun 2016 Jawa Timur memiliki rasio kemandirian daerah diatas rata-rata. Semakin besar angka rasio yang dihasilkan, semakin besar kemampuan daerah tersebut untuk membiayai kegiatannya sendiri. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio yang dihasilkan, semakin kecil kemampuan daerah untuk membiayai kegiatannya sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik menciptakan satu karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Daerah Lain Yang Sah (PDS) terhadap Belanja Daerah (BD): Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016.**



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **Tinjauan Teori**

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD merupakan pendapatan PEMDA dihasilkan melalui sumber keuangan daerah setempat serta dipungut berdasarkan PERDA. PAD diklasifikasikan menjadi empat meliputi: Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Terpisah serta PAD lain yang Sah (Siregar, 2017, hal. 32). PAD mempunyai tujuan menyerahkan kewenangan kepada PEMDA supaya dalam membiayai otonomi daerah disesuaikan dengan kemampuan daerah selaku pelaksanaan desentralisasi.

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

UU No.23 Tahun 2014 disebutkan DAU adalah dana APBN yang dialokasikan kepada daerah otonom dengan tujuan meratakan kemampuan keuangan antar daerah untuk mengongkosi kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi. Meninjau tujuan DAU untuk meratakan potensi keuangan daerah, maka tiap-tiap daerah memperoleh jumlah DAU yang tidak sama. Bobot proporsi DAU provinsi ditetapkan sebesar 10%, sedangkan kabupaten dan/atau kota ditetapkan sebesar 90%; jumlah seluruhnya DAU ditentukan minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditentukan dalam APBN.

### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan dana APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu bertujuan untuk membantu mengongkosi kegiatan khusus dan merupakan urusan serta menjadi kewenangan daerah adalah dana alokasi khusus. DAK memfokuskan tujuannya untuk memperkecil ketidakseimbangan antar daerah dalam memberikan pelayanan dasar. PP No.55 Tahun 2005 perhitungan alokasi Dana Alokasi Khusus yaitu penetapan daerah tertentu yang memperoleh DAK, dan penetapan jumlah alokasi DAK pada tiap-tiap daerah.

### **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dalam UU No.23 Tahun 2014 disebutkan DBH adalah dana APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasar pada proporsi angka tertentu dengan tujuan memperkecil ketimpangan kemampuan/potensi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Siregar (2017, hal. 83) DBH berbanding terbalik dengan DAU, tujuan DBH untuk memperkecil ketimpangan vertikal

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(*vertical imbalance*) keuangan diantara pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Menurut Siregar (2017, hal. 84-85) DBH dibagi 2 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA).

## **Pendapatan Daerah Lain yang Sah (PDS)**

Pendapatan daerah lain yang sah adalah pemasukkan dana diluar dari dana PAD serta dana perimbangan. PDS merupakan peluang bagi PEMDA untuk memperoleh pendapatan tambahan selain PAD dan subsidi dengan cara menggali potensi PDS di tiap-tiap daerah maupun berupa suntikkan dari daerah lain atau lembaga tertentu. PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 menyebutkan PDS dikelompokkan sebagai berikut: Hibah (HB); Dana darurat (DaRut) yang dialokasikan untuk menanggulangi korban serta kerusakan yang disebabkan bencana alam; DBH Pajak Provinsi kepada kabupaten/kota; Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang ditentukan pemerintah; dan Bantuan/subsidi keuangan dari provinsi ataupun dari PEMDA lain.

## **Belanja Daerah (BD)**

Dalam UU No.33 Tahun 2004 disebutkan belanja daerah adalah seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada satu periode tahun anggaran tertentu yang bersangkutan. Dengan demikian dana yang dikeluarkan oleh belanja daerah adalah upaya pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan kelompoknya BD diklasifikasikan 2 bagian, yaitu: Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL).

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD)**

Tingkat kemandirian dalam suatu daerah dapat digambarkan melalui tingginya tingkat PAD yang diperoleh PEMDA, sehingga semakin tinggi tingkat PAD yang diterima, semakin besar kemungkinan daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan belanja sehingga tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Penerimaan PAD juga mempengaruhi belanja daerah. Oleh karena itu, semakin besar penerimaan pendapatan daerah, semakin banyak pengeluaran belanja daerah yang harus dipenuhi. Berdasarkan konsep serta temuan-temuan diatas, dapat diambil hipotesis sebagai berikut:  $H_1$  = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2016.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD)**

DAU bertujuan dalam meratakan kemampuan/potensi keuangan daerah. Dengan demikian DAU adalah jaminan kesinambungan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah terutama penyediaan pelayanan pokok kepada masyarakat (Nur, 2015). Penentuan alokasi DAU ini dapat mempengaruhi belanja daerah. Apabila kebutuhan belanja daerah besar maka alokasi DAU yang diberikan besar dan apabila kebutuhan belanja daerah kecil maka alokasi DAU yang diberikan kecil. Berdasarkan konsep serta temuan-temuan diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:  $H_2 =$  Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2016.

## **Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah (BD)**

Pada hakikatnya pengertian DAK merupakan dana APBN dialokasikan pada daerah dalam membantu mendanai kebutuhan khusus. Pengalokasian dana alokasi khusus terlebih dahulu agar mengamati anggaran dana didalam APBN, artinya besar jumlah subsidi DAK per periode anggaran tidak pasti/tidak sama. DAK akan dialokasikan kepada daerah jika daerah menghadapi persoalan khusus (Susanto, 2016). Berdasarkan konsep dan temuan-temuan diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:  $H_3 =$  Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2016.

## **Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah (BD)**

DBH bagian dari dana transfer yang tujuannya agar dapat mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan hanya saja besar kecilnya tergantung kondisi pajak serta sumber daya alam tiap-tiap daerah, namun memang tidak sebesar DAU akan tetapi DBH juga memiliki andil dalam pembiayaan belanja daerah (Jatmiko, 2016). Berdasarkan konsep dan temuan-temuan diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:  $H_4 =$  Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2016.

## **Pengaruh Pendapatan Daerah Lain yang Sah (PDS) terhadap Belanja Daerah (BD)**

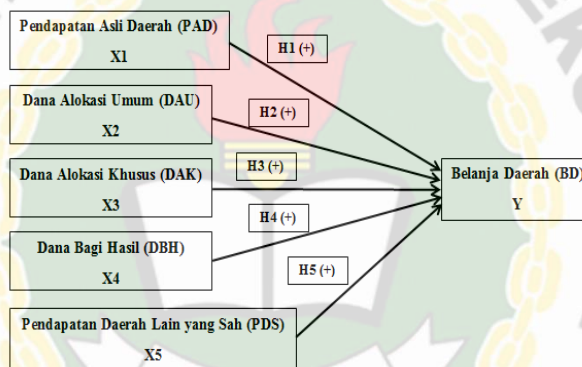
Dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 164 Ayat 1 menyebutkan “PDS adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah”. Ferdian (2013) menyatakan Pendapatan Daerah Lain yang Sah (PDS) berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah (BD), hal tersebut dapat dinyatakan pada saat PDS mengalami peningkatan berpengaruh pada kenaikan BD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PDS berpengaruh terhadap BD. Berdasarkan konsep dan temuan-temuan diatas, kesimpulan hipotesis sebagai berikut:  $H_5 =$  Pendapatan Daerah lain yang Sah (PDS) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2016.

## Model Penelitian



Gambar 2 Model Penelitian

Keterangan:



: Pengaruh positif variabel independen terhadap variabel

## Metode Penelitian

### Sampel Dan Data Penelitian

Populasi adalah banyaknya seluruh anggota obyek penelitian dengan karakteristik parameter. Sampel merupakan sebagian jumlah anggota obyek penelitian yang mempunyai sifat khas serta dianggap mewakili seluruh populasi dengan karakteristik statistik. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pemilihan sampel dengan pertimbangan/pendapat dan dengan tujuan yang telah ditentukan.

Data sekunder merupakan data penelitian kuantitatif dengan format data telah dicatat, dibuktikan, dilaporkan serta disusun berbentuk arsip (dokumenter). Data sekunder penelitian ini diperoleh lantaran media perantara sebelumnya telah memublikasikan dengan pengumpulan data melalui *web searching* atau situs web

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DJPK. Data sekunder pada penelitian ini, yaitu: PAD, DAU, DAK, DBH, PDS serta BD Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2016.

## Variabel dan Definisi Operasional Variabel

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bastian (2003, hal. 83) berpendapat PAD merupakan seluruh pendapatan daerah dipungut dari sumber ekonomi didalam wilayah itu sendiri. Hal ini dapat dikatakan setiap masing-masing daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang berbeda. PAD dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan} + \text{PAD lain yang Sah}$$

### Dana Alokasi Umum (DAU)

Bastian (2003, hal. 84) berpendapat DAU adalah dana APBN yang dialokasikan dengan tujuan meratakan kemampuan/potensi keuangan antar daerah untuk mengongkosi kebutuhan pengeluaran daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bertujuan memperkecil ketidakseimbangan horizontal (*horizontal imbalance*) antar daerah (Siregar, 2017, hal. 83). Perhitungan DAU dapat dilakukan berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{CF} + \text{AD}$$

### Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bastian (2003, hal. 84) berpendapat DAK adalah dana APBN yang tergolong dana transfer/dana perimbangan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mengongkosi program atau kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan sebagai salah satu kewenangan daerah. DAK dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{DAK} = \text{PU APBD} - \text{BPD}$$

### Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Siregar (2017, hal. 84) DBH adalah dana APBN tertentu serta tergolong dana transfer/dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan proporsi angka tertentu. Berbanding terbalik dengan DAU, tujuan DBH memperkecil ketidakseimbangan vertikal (*vertical imbalance*) diantara pemerintah pusat serta daerah menjadi tujuan dari pengalokasian dana bagi hasil. DBH dihitung menggunakan rumus:

$$\text{DBH} = \text{DBH Pajak} + \text{DBH SDA}$$

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **Pendapatan Daerah Lain yang Sah (PDS)**

Bastian (2003, hal. 84) berpendapat PDS adalah pemasukkan dana diluar dari dana PAD serta dana perimbangan/transfer. PDS dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{PDS} = \text{HB} + \text{DaRut} + \text{DBH PPDP} + \text{DPO} + \text{Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lain} \\ + \text{Pendapatan Lainnya}$$

## **Belanja Daerah (BD)**

Dalam UU No.33 Tahun 2004 disebutkan belanja daerah adalah seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengeluaran/pengurang nilai kekayaan bersih pada satu tahun periode anggaran tertentu serta daerah tidak memperoleh kembali pembayarannya. PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006, BD dihitung dengan rumus:

$$\text{BD} = \text{BTL} + \text{BL}$$

## **Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda dilakukan agar dapat menguji seberapa besar dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini  $\alpha$  ditetapkan sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ), sehingga persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{BD} = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + \beta_3 \text{DAK} + \beta_4 \text{DBH} + \beta_5 \text{PDS} + e$$

Keterangan:

BD = Belanja Daerah

$\alpha$  = Intercept (Konstanta)

$\beta_1$  PAD= Koefisien Regresi untuk Pendapatan Asli Daerah

$\beta_2$  DAU= Koefisien Regresi untuk Dana Alokasi Umum

$\beta_3$  DAK= Koefisien Regresi untuk Dana Alokasi Khusus

$\beta_4$  DBH= Koefisien Regresi untuk Dana Bagi Hasil

$\beta_5$  PDS= Koefisien Regresi untuk Pendapatan Daerah Lain yang Sah

e = Error

## **Metode Analisis Data**

### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah bagian dari kegiatan statistika yang menyajikan alat, metode atau tahapan kegiatan yang dipergunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan kumpulan data hasil pengamatan yang telah dilakukan. Dengan demikian dapat memberikan gambaran tentang data diolah antara lain dengan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

melihat nilai rerata (*mean*), *median*, *mode*, *maximum*, *minimum*, *standar error*, *count* serta *standar deviasi*.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan agar model regresi dapat mempresentasikan hubungan antara variabel bebas/independen terhadap variabel terikat/dependen yang signifikan. Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini antara lain: Uji Normalitas (Uji P-P Plot/*Normal Probability Plot* dan K-S/*One Sample-Kolmogorov Smirnov Test*), Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas (Uji *Scatterplot* dan Uji *Glejser*). Uji autokorelasi tidak dilakukan disebabkan data pada penelitian ini tidak berbentuk *time series* melainkan data *cross section*.

## 3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini yaitu uji parsial (uji t), uji simultan (uji F) dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ )

## Analisis Dan Pembahasan

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 1 Pengambilan Data**

Kriteria	Jumlah Data
Jumlah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2016	38
Jumlah kabupaten/kota tidak sesuai dengan kriteria	1
Jumlah kabupaten/kota memenuhi kriteria pengujian	37

Meninjau tabel 1 diatas diketahui bahwa data sesungguhnya sejumlah 38 data kabupaten/kota di Jawa Timur. Akan tetapi, pada penelitian ini data yang terpakai sejumlah 37 data, yaitu 29 kabupaten dan 8 kota di Jawa Timur. Hal ini diakibatkan peneliti menghilangkan data outlier sebanyak 1 data, yakni data kota Surabaya. Hal yang melatarbelakangi data outlier adalah karena pada saat melakukan pengolahan data dengan jumlah 38 data berakibat adanya variabel yang terindikasi heteroskedastisitas.

**Tabel 2 Hasil Analisis Deskriptif atas Pengolahan Data PAD, DAU, DAK, DBH, PDS dan BD Pada Tahun 2016**

	PAD	DAU	DAK	DBH	PDS	BD
Mean	306.018.257.115	956.966.607.351	266.835.738.194	114.252.068.057	341.869.525.290	2.064.148.402.432
Standar Deviasi	223.010.526.923	310.472.321.864	110.461.017.290	140.978.126.625	169.612.309.115	755.125.742.054
Maksimum	1.335.283.958.793	1.709.892.845.000	477.440.235.291	909.808.298.244	669.471.246.287	3.651.619.251.558
Minimum	109.533.498.034	397.094.498.000	83.332.171.500	51.317.087.281	65.641.771.756	785.408.101.775
Count	37	37	37	37	37	37

Sumber: Data diolah,2020.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Mengacu pada tabel 2 mengenai hasil analisis deskriptif penelitian, dapat diketahui bahwa total data pada sampel yaitu sejumlah 37 data. Variabel PAD menunjukkan nilai minimal sebanyak Rp109.533.498.034 diperoleh dari Kota Batu, serta nilai maksimal sebanyak Rp 1.335.283.958.793 yang diperoleh dari Kabupaten Sidoarjo. Nilai *mean* sebesar Rp306.018.257.115 dan standar deviasi sebesar Rp109.533.498.034. Variabel Dana Alokasi Umum mempunyai nilai minimal Rp397.094.498.000 yang diperoleh melalui Kota Mojokerto dan nilai maksimal Rp1.709.892.845.000 diperoleh melalui Kabupaten Jember. Nilai *mean* sebesar Rp956.966.607.351 dan standar deviasi sebesar Rp310.472.321.864.

Variabel Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai minimal Rp83.332.171.500 yang diperoleh dari Kota Probolinggo dan nilai maksimal sebesar Rp477.440.235.291 yang diperoleh dari Kabupaten Tulungagung. Nilai *mean* sebesar Rp266.835.738.194 dan standar deviasi Rp110.461.017.290. Variabel Dana Bagi Hasil mempunyai nilai minimal Rp51.317.087.281 yang diperoleh dari Kota Batu dan nilai maksimal sebesar Rp909.808.298.244 yang diperoleh dari Kabupaten Bojonegoro. Nilai *mean* sebesar Rp114.252.068.057 dan standar deviasi Rp140.978.126.625.

Variabel Pendapatan Daerah Lain yang Sah mempunyai nilai minimal Rp65.641.771.756 diperoleh dari Kota Pasuruan dan nilai maksimal sebesar Rp669.471.246.287 yang diperoleh Kabupaten Bojonegoro. Nilai *mean* sebesar Rp341.8669.525.290 dan standar deviasi Rp169,612.309.115. Variabel Belanja Daerah mempunyai nilai minimal Rp785.408.101.775 yang diperoleh dari Kota Pasuruan dan nilai maksimal sebesar Rp3.651.619.251.558 yang diperoleh dari Kabupaten Sidoarjo. Nilai *mean* sebesar Rp2.064.148.4022.432 dan standar deviasi Rp755.125.742.054.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a) Uji Normalitas

**Tabel 3 Hasil Analisis Uji Normalitas (K-S)**

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
N	37
Kolmogorov-Smirnov Z	0,791
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,560

Sumber: Data diolah,2020.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Meninjau tabel 3 diatas, ditemukan nilai Kolmogorov-Smirnov  $Z = 0,791$  serta nilai Sign. = 0,560. Nilai Sign. = 0,560 lebih besar daripada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,05. Hasil tersebut menyimpulkan data mengandung pendistribusian normal.

## b) Uji Multikolinearitas

**Tabel 4 Hasil Analisis Uji Multikolinearitas**

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Keputusan
	Tolerance	VIF	
PAD	0,495	2,019	Tidak terindikasi multikolinearitas
DAU	0,211	4,733	Tidak terindikasi multikolinearitas
DAK	0,158	6,343	Tidak terindikasi multikolinearitas
DBH	0,391	2,555	Tidak terindikasi multikolinearitas
PDS	0,143	6,990	Tidak terindikasi multikolinearitas

Sumber: Data diolah,2020.

Meninjau tabel 4 menunjukkan hasil seluruh tingkat TOL  $> 0,10$  dan seluruh nilai VIF menunjukkan  $< 10$ . Artinya, penelitian ini tidak terindikasi multikolinearitas.

## c) Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

**Tabel 5 Hasil Analisis Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)**

Variabel	Sig.	Keputusan
PAD	0,973	Terjadi homoskedastisitas
DAU	0,099	Terjadi homoskedastisitas
DAK	0,788	Terjadi homoskedastisitas
DBH	0,335	Terjadi homoskedastisitas
PDS	0,243	Terjadi homoskedastisitas

Sumber: Data diolah,2020.

Tabel 5 menyatakan tingkat probabilitas PAD  $0,973 > 5\%$ , DAU  $0,099 > 5\%$ , DAK  $0,788 > 5\%$ , DBH  $0,335 > 5\%$  dan LLPDS  $0,243 > 5\%$ . Hasil tersebut menunjukkan tidak terjadi heteroskedstisitas. Jika tidak terindikasi adanya heteroskedastisitas, model regresi dapat dikatakan baik. Dikataka tidak terindikasi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai absolt residualnya  $> 5\%$ .

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 3. Hasil Analisis Regresi Berganda

**Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Berganda**

Model	Koefisien Regresi	Sig.	Keputusan
(Constant)	96846270919,6		
PAD	0,791	0,000	H <sub>1</sub> Didukung
DAU	0,974	0,000	H <sub>2</sub> Didukung
DAK	0,564	0,146	H <sub>3</sub> Tidak Didukung
DBH	0,981	0,000	H <sub>4</sub> Didukung
PDS	1,551	0,000	H <sub>5</sub> Didukung

Sumber: Data diolah SPSS,2020.

Merujuk tabel 6 diatas dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$BD = 96846270919,6 + 0,791 PAD + 0,974 DAU + 0,564 DAK + 0,981 DBH + 1,551 PDS + e$$

Berikut dapat diketahui nilai koefisien dari variabel PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), DBH (X4) dan PDS (X5) bahwa:

Konstanta bernilai 96846270919,6 berarti ketika seluruh variabel independen dianggap konstan (tetap), maka nilai rata-rata Belanja Daerah meningkat sebesar Rp96.846.270.920. Tanda koefisien PAD menerangkan hubungan searah atau pengaruh positif pada Belanja Daerah. Dengan demikian, semakin bertambah PAD maka BD akan semakin tinggi. PAD berpengaruh terhadap BD dengan nilai koefisien sebesar 0,791. Tanda koefisien DAU memperlihatkan hubungan searah atau pengaruh positif untuk Belanja Daerah. Dengan demikian, semakin bertambah DAU maka BD akan semakin tinggi. DAU berpengaruh terhadap BD dengan nilai koefisien sebesar 0,974.

Tanda koefisien DAK memperlihatkan pengaruh positif terhadap BD dengan nilai koefisien 0,564. Artinya, perubahan yang terjadi pada DAK tidak akan merubah nilai Belanja Daerah. Tanda koefisien DBH menandakan hubungan searah atau pengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian, bertambahnya DBH juga akan diikuti oleh peningkatan BD. DBH berpengaruh terhadap BD dengan nilai koefisien sebesar 0,981. Tanda koefisien PDS memperlihatkan hubungan searah atau pengaruh positif terhadap BD. Dengan demikian, bertambahnya PDS juga akan diikuti oleh BD. PDS berpengaruh terhadap BD dengan nilai koefisien sebesar 1,551.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 4. Uji Hipotesis

### a) Uji F (Simultan)

**Tabel 7 Hasil Analisis Uji F (Simultan)**

ANOVA			
	Df	F	Sig.
Regresi	5	408,16	0,000
Residual	31		
Total	36		

Sumber: Data diolah, 2020.

Hasil dari tabel 7 menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $= 0,000 < 5\%$  ( $\alpha = 0,05$ ). Nilai Sig. tersebut merupakan tingkat kesalahan model yang diajukan. Artinya, tingkat kesalahan yang ditanggung pada penelitian ini adalah sebesar  $= 0,000$ . Tingkat kesalahan ini jauh di bawah nilai  $\alpha = (0,005)$  yang telah ditetapkan diawal yaitu  $5\%$ . Selain itu, hasil pengolahan data dengan *F-test* didapat dari nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $408,157 > 2.53$ . Hal ini menyatakan secara serentak/simultan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara simultan.

### b) Uji Parsial (*t-test*)

**Tabel 8 Hasil Analisis Uji t (Parsial)**

Model	Koefisien Regresi	Sig.	Keputusan
(Constant)	96846270919,6		
PAD	0,791	0,000	H <sub>1</sub> Didukung
DAU	0,974	0,000	H <sub>2</sub> Didukung
DAK	0,564	0,146	H <sub>3</sub> Tidak Didukung
DBH	0,981	0,000	H <sub>4</sub> Didukung
PDS	1,551	0,000	H <sub>5</sub> Didukung

Sumber: Data diolah SPSS,2020.

Dari tabel 8 didapatkan PAD berpengaruh pada belanja daerah dengan arah positif. Nilai  $t_{tabel}$  pada  $\alpha = 0,05$  adalah  $1,645$ . Nilai  $t_{hitung}$  PAD ( $H_1$ ) yaitu  $7,485$  dengan Sig.  $H_1$  sebesar  $0,000$ . Hal ini dinyatakan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $7,485 > 1,960$  serta nilai signifikansi  $< 5\%$  ( $\alpha = 0,05$ ). Dengan demikian  $H_1$  didukung, yang artinya PAD berpengaruh signifikan positif terhadap BD.

Nilai  $t_{hitung}$  untuk Dana Alokasi Umum ( $H_2$ ) sejumlah  $8,379$  serta tingkat signifikansinya yaitu  $0,000 < 5\%$  ( $\alpha = 0,05$ ). Hal ini dinyatakan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $8,379 > 1,645$  serta nilai signifikansi  $< 5\%$  ( $\alpha = 0,05$ ) berarti  $H_2$  didukung. Dengan demikian, DAU berpengaruh signifikan positif terhadap BD.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dana Alokasi Khusus ( $H_3$ ) memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,492. Signifikansi sebesar  $0,146 > 5\%$  ( $\alpha = 0,05$ ). Hal ini dinyatakan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $1,492 < 1,645$  serta nilai signifikansi  $> 5\%$  ( $\alpha = 0,05$ ) berarti  $H_3$  tidak didukung. Hal tersebut berarti DAK berpengaruh positif terhadap BD, namun tidak signifikan. Artinya, DAK tidak berpengaruh signifikan positif terhadap BD.

Dana Bagi Hasil ( $H_4$ ) berpengaruh terhadap Belanja Daerah dengan arah positif. Hal ini dinyatakan dengan hasil nilai  $t_{hitung}$  DBH yaitu 5,214 dengan Sig.  $H_4$  sebesar 0,000. Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $5,214 > 1,645$  serta nilai signifikansi  $< 5\%$  ( $\alpha = 0,05$ ). Nilai signifikansi tersebut telah menunjukkan nilai  $< 5\%$  ( $\alpha = 0,05$ ) berarti  $H_4$  didukung. Artinya, DBH berpengaruh signifikan positif terhadap BD.

Nilai  $t_{hitung}$  Pendapatan Daerah Lain yang Sah ( $H_5$ ) sebesar 5,999 serta tingkat signifikansinya yaitu  $0,000 < 5\%$  ( $\alpha = 0,05$ ). Hal ini dinyatakan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $5,999 > 1,960$  serta nilai signifikansi  $< 5\%$  ( $\alpha = 0,05$ ) berarti  $H_5$  didukung. Dengan demikian, PDS memiliki pengaruh signifikan positif terhadap BD.

## c) Koefisien Determinasi ( $R^2/R$ Square)

Tabel 9 Hasil Analisis Uji Koefisien Determinasi/ $R^2$

R	R Square	Adjusted R Square
0,992	0,985	0,983

Sumber: Data diolah, 2020.

Meninjau pada tabel 4.10 nilai  $R^2 = 0,983$ . Artinya, besarnya variasi variabel independen dalam mempengaruhi model persamaan regresi adalah sebesar 98,3% dan sisanya 1,7% dijelaskan oleh variabel independen yang lain.

## Pembahasan

### Pengaruh PAD terhadap BD

Hipotesis PAD berpengaruh signifikan positif terhadap BD. Berdasarkan analisis data, variabel PAD mempunyai koefisien regresi sebesar  $= 0,791$  dan Sig. sebesar  $= 0,000$ . Hasil penelitian ini menunjukkan PAD berpengaruh signifikan positif terhadap BD. Hasil ini berkaitan dengan penelitian Ernayani (2017) menyimpulkan jika  $H_0$  ditolak atau  $H_A$  diterima, artinya PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap BD. Besarnya PAD berpengaruh signifikan positif terhadap BD sehingga kenaikan PAD dapat membantu meningkatkan kegiatan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ekonomi masyarakat setempat dengan menggali potensi di daerah itu sendiri agar dimanfaatkan secara berkala (Rachmawati, 2016).

## **Pengaruh DAU terhadap BD**

Hipotesis DAU berpengaruh signifikan positif terhadap BD. Berdasarkan hasil analisis data, variabel DAU mempunyai koefisien regresi sebesar = 0,974 dan Sig. sebesar = 0,000. Hasil analisis ini menunjukkan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap BD. Peningkatan jumlah DAU berdampak pada kenaikan BD. DAU bertujuan dalam meratakan kekuatan/kecukupan keuangan daerah. Dengan demikian dana alokasi umum adalah jaminan kesinambungan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Masdjojo (2009), Nisa (2017) dan Sasana (2010) yang menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap BD.

## **Pengaruh DAK terhadap BD**

Hipotesis DAK tidak berpengaruh positif terhadap BD. Berdasarkan hasil analisis data, variabel DAK mempunyai koefisien regresi sebesar = 0,564 dan Sig. sebesar = 0,146. Hasil analisis menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap BD. Meninjau nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $1,492 < 1,960$  serta nilai signifikansi  $0,146 > 5\%$  ( $\alpha = 0,05$ ). Hal ini berkaitan dengan penelitian Ernayani (2017) menyebutkan walaupun DAK berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap BD. Artinya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini tidak terbukti, yaitu bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap BD kendatipun arahnya positif. Masdjojo (2009) dan Handayani (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap BD, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Amalia (2015) dan Susanto (2016) menyimpulkan bahwa DAK berpengaruh terhadap BD.

## **Pengaruh DBH terhadap BD**

Hipotesis DBH berpengaruh signifikan positif terhadap BD. Berdasarkan analisis data, variabel DBH mempunyai koefisien regresi sebesar = 0,981 dan Sig. sebesar = 0,000. Hasil ini menandakan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap BD. DBH adalah dana APBN yang pengalokasiannya terhadap daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu bertujuan memperkecil ketimpangan kekuatan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Diperkuat



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

oleh penelitian Masdjojo (2009), Sasana (2010) dan Ernayani (2017) menyimpulkan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

## **Pengaruh PDS terhadap BD**

Hipotesis PDS berpengaruh signifikan positif terhadap BD. Berdasarkan analisis variabel PDS mempunyai koefisien regresi sebesar = 1,551 dan Sig. sebesar = 0,000. Hal ini dinyatakan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $5,999 > 1,960$  serta nilai signifikansi  $< 5\%$  ( $\alpha = 0,05$ ). Hasil ini memperlihatkan PDS berpengaruh signifikan positif terhadap BD. Ferdian (2013) menyatakan bahwa peningkatan PDS berpengaruh positif dan signifikan terhadap BD. Artinya, kenaikan PDS dapat meningkatkan BD.

## **Kesimpulan**

Bersumber pada hasil analisis dan pembahasan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya PAD diharapkan dapat membantu meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat setempat dengan menggali potensi di daerah itu sendiri agar dapat dimanfaatkan secara berkala. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah (BD). Hal ini menunjukkan bahwa apabila DAU mengalami kenaikan diharapkan adanya pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah (BD). Hal ini dapat dilihat dari nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $1,492 < 1,645$  serta nilai signifikansi  $0,146 > 5\%$  ( $\alpha = 0,05$ ). Hal tersebut menunjukkan DAK tidak berpengaruh terhadap BD kendatipun arahnya positif. Artinya, DAK hanya diberikan kepada daerah dengan kebutuhan khusus yang menjadi prioritas nasional. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah (BD). Hal tersebut menunjukkan semakin banyak jumlah DBH yang ditransfer kepada daerah, semakin banyak belanja daerah yang dapat dikeluarkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik serta pengembangan infrastruktur di masing-masing daerah. Pendapatan Daerah Lain yang Sah (PDS) berpengaruh

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

signifikan positif terhadap Belanja Daerah (BD). Hal ini menunjukkan peningkatan pendapatan daerah lain yang sah dapat meningkatkan belanja daerah.

## Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020, Februari 06). Diambil kembali dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Algifari. (2016). *Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Amalia, W. R. (2015). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009-2013). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 15 (1), 1-12.
- Bastian, I. d. (2003). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Devita, A. D. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2 (2), ISSN: 2338-4603.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1 (1), ISSN 2580-5398.
- Ferdian, Y. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang.
- Ferdiansyah, I. D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *INOVASI*, 14 (1), 44-52.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, D. d. (2012). Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 1 (1).
- Jatmiko, P. E. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14 (1).
- Jolianis. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pelangi*, 7 (1), 47-60.
- Junaidi, D. N. (2018). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) di Malang Raya Tahun 2011-2017. *E-JRA*, 7 (3).
- Ketetapan MPR RI No.XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI. (t.thn.).
- Kusumadewi, D. A. (2017). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *JAAI*, 11 (1), 67-80.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Masdjojo, G. N. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *TEMA*, 6 (1), 32-50.
- Nisa, A. A. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1 (2), 203-214.
- Nur, M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Sulawesi Selatan. *ASSETS*, 5 (1), 78-88.
- Rachmawati, L. (2016). *Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah: Studi Kasus Pada Pulau Jawa Tahun 2012-2014. Skripsi. STIE YKPN. Yogyakarta.*
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (t.thn.).
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. (t.thn.).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. (t.thn.).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (t.thn.).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. (t.thn.).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (t.thn.).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. (t.thn.).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. (t.thn.).
- Sasana, H. (2010). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi di Indonesia. *EKO-REGIONAL*, 5 (2).
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Subiyakto, H. (2001). *Statistika (Inferen) Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, A. I. (2018). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Periode 2011-2013). *Journal Of Accounting Science*, 2 (2), EISSN 2548-3501.
- Susanto, E. d. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur) . *STIE Semarang*, 8 (1), ISSN: 252-826.
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia Tahun 2012. *Accounting Analysis Journal*, 1.

